

BIMBINGAN TEKNIS PROYEKSI KEUANGAN DAN TATA KELOLA AKUNTABEL BAGI KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

Asmar Yunus^{1*}, Adriansyah², Anisatun Humayrah Rais³, Yulia Yunita Yusuf⁴, Munadhir⁵

¹ asmaryunus@unm.ac.id, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

² adriansyah@unm.ac.id, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

³ anisatun.humayrah,rais@unm.ac.id, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

⁴ yulia.yunita.yusuf@unm.ac.id, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

⁵ munadhir.ado@gmail.com, Universitas Pejuang Republik Indonesia, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Pengajuan : 20/12/2025

Revisi : 22/04/2026

Penerimaan : 28/04/2026

Kata Kunci:

Koperasi, Proyeksi Keuangan, Analisis Kelayakan, Tata Kelola, Akuntabilitas

Keywords:

Cooperatives, Financial Projections, Feasibility Analysis, Governance, Accountability

DOI:

10.52859/jam.v5i1.886

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Makassar dalam menyusun proyeksi keuangan, melakukan analisis kelayakan usaha, serta menerapkan tata kelola keuangan koperasi yang akuntabel sebagai dasar penyusunan rencana bisnis dan pengajuan proposal pinjaman. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28–30 Oktober 2025 di Hotel Claro Makassar, dengan melibatkan 152 KKMP sesuai jumlah kelurahan di Kota Makassar. Metode pelaksanaan berupa bimbingan teknis yang mencakup penyampaian materi, latihan penyusunan proyeksi arus kas, laporan laba rugi dan neraca, diskusi studi kasus, serta sesi berbagi pengalaman. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi partisipasi peserta, umpan balik kegiatan dan penilaian hasil latihan penyusunan proyeksi keuangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai fungsi proyeksi keuangan sebagai alat perencanaan dan pengendalian, kemampuan dalam mengidentifikasi sumber pendapatan dan komponen biaya koperasi serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya transparansi, pencatatan keuangan yang tertib dan mekanisme pengawasan melalui Rapat Anggota Tahunan dan audit. Kegiatan ini berimplikasi pada meningkatnya kesiapan KKMP dalam menyusun rencana bisnis yang lebih kredibel, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan serta mendukung akses pendanaan koperasi yang berkelanjutan.

ABSTRACT

This community service program aimed to enhance the capacity of Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) managers in Makassar City in preparing financial projections, conducting business feasibility analysis, and implementing accountable cooperative financial governance as a basis for business planning and loan proposal submission. The program was conducted on 28–30 October 2025 at Claro Hotel Makassar, involving 152 KKMPs, corresponding to the total number of sub-districts in Makassar City. The program employed technical assistance methods, including lectures, hands-on practice in developing projected cash flow statements, income statements, and balance sheets, case-based discussions, and experience-sharing sessions. Evaluation was carried out through participant observation, activity feedback, and assessment of the financial projection outputs produced during the sessions. The results indicate improved participant understanding of financial projections as planning and control tools, enhanced ability to identify key revenue sources and cost components, and increased awareness of transparency, proper financial recording, and monitoring mechanisms through annual member meetings and audits. These outcomes imply greater readiness of KKMPs to develop more credible business plans, strengthen financial accountability, and support sustainable access to cooperative financing.

Pendahuluan

Koperasi merupakan institusi ekonomi berbasis anggota yang memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, memperluas akses pembiayaan dan mendorong pemerataan kesejahteraan pada level komunitas. Sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan partisipasi anggota, koperasi tidak hanya dituntut mampu menjalankan aktivitas usaha secara produktif, tetapi juga harus mengelola keuangan secara tertib, transparan dan akuntabel. Dalam praktiknya, keberhasilan koperasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas pengurus dalam menyusun

perencanaan usaha, memproyeksikan kondisi keuangan serta menerapkan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota maupun pemangku kepentingan lainnya.

Penguatan koperasi menjadi semakin relevan dalam agenda pembangunan nasional seiring dengan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini ditegaskan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 yang menempatkan koperasi desa/kelurahan sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat melalui sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa koperasi tidak lagi diposisikan semata sebagai entitas administratif, tetapi sebagai kelembagaan ekonomi yang harus memiliki kesiapan operasional, manajerial dan finansial agar mampu berkembang secara berkelanjutan ([Presiden Republik Indonesia, 2025](#)).

Sejalan dengan itu, dukungan pendanaan bagi koperasi juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Regulasi ini mengisyaratkan bahwa koperasi yang akan mengakses pembiayaan perlu menunjukkan kelayakan usaha, kesiapan pengelolaan keuangan serta kemampuan menyusun dokumen perencanaan bisnis yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, koperasi tidak cukup hanya terbentuk secara formal, tetapi juga harus mampu menyajikan proyeksi arus kas, laporan laba rugi, neraca proyeksi serta sistem tata kelola keuangan yang mendukung akuntabilitas pengelolaan dana. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025](#))

Dalam konteks Kota Makassar, kebutuhan penguatan kapasitas koperasi kelurahan direspons melalui kegiatan bimbingan teknis penyusunan rencana bisnis dan pengajuan proposal pinjaman bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28–30 Oktober 2025 di Hotel Claro Makassar dengan melibatkan 152 KKMP sesuai jumlah kelurahan di Kota Makassar. Skala kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan peningkatan kapasitas pengurus koperasi tidak bersifat sporadis, melainkan luas, sistemik dan memerlukan pendekatan yang terstruktur agar kualitas pengelolaan koperasi dapat lebih seragam dan terstandar ([Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, 2025](#)).

Meskipun secara normatif koperasi diharapkan memiliki kemampuan menyusun rencana bisnis yang layak, proyeksi keuangan yang realistis dan tata kelola yang akuntabel, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak pengurus koperasi kelurahan masih menghadapi keterbatasan dalam aspek tersebut. Sebagian pengurus belum memiliki keterampilan yang memadai dalam menyusun proyeksi arus kas, laporan laba rugi dan neraca proyeksi secara sederhana tetapi kredibel. Selain itu, pemahaman mengenai analisis kelayakan usaha masih terbatas, sehingga keputusan usaha sering belum didasarkan pada identifikasi peluang, risiko dan kemampuan pengelolaan yang terukur. Pada saat yang sama, penerapan tata kelola keuangan koperasi yang transparan dan tertib juga belum sepenuhnya menjadi praktik yang melembaga dalam pengelolaan koperasi tingkat kelurahan.

Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara tuntutan ideal kebijakan dan kapasitas aktual pengurus koperasi. Pada satu sisi, koperasi dituntut siap mengakses pembiayaan melalui proposal usaha yang layak dan akuntabel; namun pada sisi lain, tidak semua koperasi memiliki kemampuan teknis dan manajerial untuk memenuhi persyaratan tersebut. Kesenjangan ini berpotensi menghambat kesiapan koperasi dalam menyusun dokumen bisnis yang meyakinkan, memperlemah kepercayaan calon pemberi dana dan pada akhirnya membatasi peluang koperasi untuk berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk bimbingan teknis menjadi penting sebagai sarana penguatan

kapasitas pengurus koperasi agar mampu menjembatani kebutuhan regulatif dengan realitas kapasitas di lapangan.

Proyeksi keuangan merupakan salah satu instrumen utama dalam perencanaan usaha koperasi. Proyeksi ini menggambarkan estimasi pendapatan, biaya dan posisi keuangan koperasi pada periode tertentu serta berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian usaha dan evaluasi kinerja. Koperasi yang mampu menyusun proyeksi keuangan secara sistematis akan lebih siap dalam merencanakan kebutuhan modal, mengantisipasi risiko likuiditas dan meyakinkan pihak eksternal terhadap kelayakan usaha yang dijalankan. Namun, proyeksi keuangan tidak dapat berdiri sendiri. Dokumen ini harus didukung oleh analisis kelayakan usaha yang memadai dan praktik tata kelola keuangan yang akuntabel agar rencana bisnis koperasi tidak hanya rasional di atas kertas, tetapi juga realistis dan dapat dijalankan.

Selain aspek teknis penyusunan angka, koperasi juga memerlukan penguatan dari sisi tata kelola. Akuntabilitas keuangan koperasi menjadi penting karena koperasi mengelola dana bersama anggota yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan melalui pencatatan yang tertib, pelaporan yang konsisten dan mekanisme pengawasan organisasi seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT), badan pengawas, maupun audit internal dan eksternal. Dalam kerangka ini, penguatan kapasitas pengurus koperasi tidak cukup difokuskan pada kemampuan menyusun proposal pembiayaan, tetapi juga perlu diarahkan pada pembentukan praktik tata kelola yang sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian ini adalah: (1) bagaimana meningkatkan kemampuan pengurus KKMP dalam menyusun proyeksi keuangan koperasi yang sederhana namun kredibel; (2) bagaimana meningkatkan pemahaman pengurus KKMP dalam melakukan analisis kelayakan usaha sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis; dan (3) bagaimana memperkuat penerapan tata kelola keuangan koperasi yang transparan, tertib dan akuntabel sebagai landasan penyusunan rencana bisnis serta pengajuan proposal pinjaman. Rumusan masalah ini menunjukkan bahwa kebutuhan penguatan kapasitas koperasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut kemampuan teknis, manajerial dan kelembagaan yang saling berkaitan.

Kegiatan pengabdian ini dirancang dalam bentuk bimbingan teknis terpadu yang mengintegrasikan tiga kompetensi kunci, yaitu proyeksi keuangan, analisis kelayakan usaha dan tata kelola keuangan koperasi yang akuntabel. Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi ketiga aspek tersebut dalam satu desain *capacity building* yang diarahkan langsung pada kebutuhan riil KKMP untuk menyusun rencana bisnis dan proposal pinjaman. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan dalam skala besar dengan melibatkan 152 koperasi kelurahan di Kota Makassar, sehingga memiliki cakupan intervensi yang lebih luas dibandingkan pelatihan koperasi yang umumnya hanya berfokus pada satu aspek teknis tertentu. Dengan pendekatan ini, kegiatan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pemahaman konseptual, tetapi juga pada kesiapan praktis pengurus koperasi dalam memenuhi tuntutan pengelolaan usaha dan akses pendanaan.

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar dalam menyusun proyeksi arus kas, laporan laba rugi dan neraca proyeksi; meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis kelayakan usaha dan identifikasi risiko dasar; serta memperkuat penerapan tata kelola keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan penyusunan rencana bisnis dan pengajuan proposal pinjaman (Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, 2025; Adriansyah, 2025). Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas dokumen bisnis koperasi menjadi lebih kredibel, akuntabilitas pengelolaan

keuangan semakin kuat, dan kesiapan koperasi untuk mengakses pendanaan berkelanjutan dapat meningkat. (Presiden Republik Indonesia, 2025; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Telaah Literatur

Proyeksi Keuangan Koperasi sebagai Instrumen Perencanaan dan Pengendalian

Proyeksi keuangan merupakan alat penting dalam perencanaan usaha yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan organisasi di masa depan berdasarkan asumsi yang realistis. Dalam konteks koperasi, proyeksi keuangan mencakup penyusunan proyeksi arus kas, laporan laba rugi dan neraca proyeksi yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan usaha dan pengendalian kinerja pengurus. Proyeksi yang disusun secara sistematis memungkinkan koperasi mengantisipasi kebutuhan likuiditas, merencanakan pengembangan usaha serta menilai kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang (Kasmir, 2019).

Beberapa penelitian menegaskan bahwa koperasi dan usaha kecil yang memiliki proyeksi keuangan yang baik cenderung lebih siap dalam mengakses pendanaan eksternal. Menurut Brigham dan Ehrhardt (2017), lembaga keuangan menggunakan proyeksi keuangan sebagai alat utama untuk menilai kredibilitas rencana usaha dan kemampuan debitur dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini sejalan dengan praktik pendanaan koperasi, di mana proposal pinjaman harus dilengkapi dengan proyeksi keuangan yang mencerminkan asumsi usaha yang rasional dan dapat diverifikasi.

Dalam pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kemampuan menyusun proyeksi keuangan dipandang sebagai bentuk *capacity building* yang strategis. Adriansyah (2025) menekankan bahwa proyeksi keuangan koperasi tidak harus kompleks, tetapi harus konsisten, transparan dan berbasis data riil agar dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja dan sarana komunikasi keuangan dengan anggota serta pihak pemberi dana. Oleh karena itu, pelatihan proyeksi keuangan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan akuntabilitas koperasi tingkat kelurahan.

Temuan pengabdian masyarakat pada Jurnal Abdi Mandala memperkuat pentingnya pelatihan teknis keuangan bagi pelaku usaha dan organisasi berbasis komunitas. Syafiudin *et al.* (2025) menunjukkan bahwa pelatihan pembukuan dan pengelolaan keuangan bagi pengrajin kulit di Sukaregang Garut yang dilakukan melalui pemaparan teori, praktik langsung dan diskusi interaktif mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap pencatatan keuangan dan penyusunan laporan keuangan sederhana. Hasil ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas keuangan akan lebih efektif ketika peserta tidak hanya menerima materi konseptual, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk berlatih secara langsung.

Sejalan dengan itu, Rais *et al.* (2025) dalam pendampingan digitalisasi pembukuan pada UMKM Jeruk Ceya Kota Makassar menegaskan bahwa pencatatan keuangan yang tertib dan didukung penggunaan media digital dapat membantu pelaku usaha memisahkan keuangan usaha dan pribadi, meningkatkan profesionalisme usaha serta memperkuat kesiapan mengakses pembiayaan formal. Temuan ini relevan dengan kebutuhan koperasi, karena proyeksi keuangan yang baik mensyaratkan data dasar yang tertib, pencatatan yang konsisten, dan disiplin administrasi keuangan.

Selain itu, Kuswanto (2024) menunjukkan bahwa edukasi pembukuan sederhana bagi UMKM mitra BUMDes berperan penting dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha memahami informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyusunan informasi keuangan, baik dalam bentuk pembukuan sederhana maupun proyeksi keuangan, merupakan prasyarat penting bagi pengelolaan usaha yang lebih terarah, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, literatur pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa pelatihan dan

pendampingan keuangan yang aplikatif memiliki kontribusi nyata dalam memperkuat kapasitas perencanaan dan pengendalian usaha.

Analisis Kelayakan Usaha Koperasi

Analisis kelayakan usaha merupakan proses evaluasi sistematis untuk menilai apakah suatu rencana usaha layak dijalankan dari aspek ekonomi, keuangan dan risiko. Dalam koperasi, analisis kelayakan tidak hanya bertujuan mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memastikan bahwa usaha yang dijalankan memberikan manfaat berkelanjutan bagi anggota. Menurut [Umar \(2015\)](#), analisis kelayakan membantu organisasi menilai potensi keuntungan, mengidentifikasi risiko serta meminimalkan kemungkinan kegagalan usaha sebelum investasi dilakukan.

Aspek kelayakan usaha koperasi umumnya mencakup penilaian pasar, operasional dan keuangan, termasuk analisis risiko pasar, risiko operasional dan risiko kredit. Studi yang dilakukan oleh [Tambunan \(2020\)](#) menunjukkan bahwa banyak koperasi gagal berkembang karena keputusan usaha diambil tanpa analisis kelayakan yang memadai, sehingga koperasi kesulitan menjaga arus kas dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, integrasi analisis kelayakan dengan proyeksi keuangan menjadi pendekatan yang efektif untuk memastikan rencana usaha koperasi bersifat realistis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha.

Dalam konteks pengajuan proposal pinjaman, analisis kelayakan menjadi komponen kunci yang dinilai oleh lembaga pemberi dana. PMK Nomor 49 Tahun 2025 menegaskan bahwa koperasi penerima pendanaan harus mampu menunjukkan kelayakan usaha dan kemampuan pengelolaan keuangan secara objektif ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025](#)). Dengan demikian, peningkatan kapasitas pengurus koperasi dalam melakukan analisis kelayakan usaha merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan akses pembiayaan koperasi kelurahan.

Penguatan aspek kelayakan usaha juga dapat dipahami dari temuan pengabdian masyarakat yang menekankan pentingnya keterkaitan antara pencatatan keuangan, perencanaan usaha, dan keberlanjutan bisnis. [Syafiudin et al. \(2025\)](#), [Rais et al. \(2025\)](#), dan [Kuswanto \(2024\)](#) pada dasarnya menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan akan membantu pelaku usaha dan organisasi usaha dalam membaca kondisi usahanya secara lebih objektif, menilai kemampuan finansial serta merencanakan langkah pengembangan yang lebih rasional. Dalam konteks koperasi, hal ini berarti bahwa analisis kelayakan usaha tidak dapat dilepaskan dari tersedianya informasi keuangan yang memadai dan kemampuan pengurus dalam menginterpretasikan data tersebut sebagai dasar penyusunan rencana bisnis dan proposal pinjaman.

Tata Kelola Keuangan Koperasi yang Akuntabel

Tata kelola keuangan koperasi yang akuntabel merupakan prinsip fundamental dalam menjaga kepercayaan anggota dan keberlanjutan kelembagaan koperasi. Akuntabilitas keuangan didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya keuangan secara transparan, terdokumentasi dan dapat diaudit oleh pihak yang berkepentingan ([Mardiasmo, 2018](#)). Dalam koperasi, akuntabilitas memiliki dimensi yang lebih luas karena dana yang dikelola merupakan dana bersama anggota yang harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme organisasi seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Regulasi nasional menempatkan tata kelola keuangan sebagai kewajiban formal koperasi. Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 mengatur kebijakan akuntansi koperasi agar laporan keuangan disusun secara tertib, konsisten dan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku ([Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2024](#)). Selain itu, koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan juga harus

mematuhi ketentuan pengawasan dan pelaporan sesuai regulasi otoritas terkait. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi indikator utama kelayakan koperasi dalam menerima pendanaan dan dukungan pemerintah.

Literatur menunjukkan bahwa tata kelola keuangan yang baik berkontribusi langsung terhadap kinerja dan keberlanjutan koperasi. Penelitian oleh [Nugroho dan Hadi \(2021\)](#) menemukan bahwa koperasi dengan sistem pencatatan keuangan yang transparan dan mekanisme pengawasan yang efektif memiliki tingkat kepercayaan anggota dan stabilitas keuangan yang lebih tinggi. Dalam konteks pengabdian masyarakat, penguatan tata kelola keuangan koperasi dipandang sebagai intervensi strategis untuk mendorong profesionalisme pengurus, memperkuat kontrol internal, serta menciptakan budaya organisasi yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan anggota.

Metode

Desain dan Pendekatan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan *capacity building* melalui bimbingan teknis (*technical assistance*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama kegiatan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga meningkatkan keterampilan praktis serta kesiapan pengurus koperasi dalam menyusun rencana bisnis dan proposal pinjaman secara mandiri dan berkelanjutan. Pendekatan *capacity building* dinilai relevan dalam penguatan kelembagaan koperasi karena mengombinasikan aspek edukatif, partisipatif dan aplikatif. ([Mardiasmo, 2018](#)).

Bentuk kegiatan pengabdian berupa bimbingan teknis terpadu yang mengintegrasikan penyampaian materi konseptual, latihan penyusunan proyeksi keuangan, diskusi studi kasus dan sesi berbagi pengalaman. Model ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya sesuai dengan kondisi riil koperasi masing-masing. Pendekatan partisipatif digunakan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran sehingga materi yang disampaikan lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 28–30 Oktober 2025 bertempat di Hotel Claro Makassar, Kota Makassar. Pelaksanaan kegiatan difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai mitra utama yang berperan dalam koordinasi peserta dan dukungan kelembagaan kegiatan.

Sasaran kegiatan adalah Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang berada di seluruh wilayah Kota Makassar. Jumlah peserta kegiatan sebanyak 152 KKMP sesuai dengan jumlah kelurahan di Kota Makassar. Peserta merupakan pengurus koperasi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan organisasi dan keuangan, seperti ketua, sekretaris, bendahara dan pengelola unit usaha. Karakteristik peserta yang beragam dari sisi pengalaman dan kapasitas pengelolaan koperasi menjadi dasar perlunya pendekatan pembelajaran yang aplikatif, bertahap dan mudah diimplementasikan.

Materi dan Tahapan Pelaksanaan

Materi kegiatan disusun secara terstruktur dan disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan rencana bisnis dan proposal pinjaman koperasi. Secara umum, pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan mitra pelaksana, identifikasi kebutuhan peserta, penyusunan bahan ajar serta penyiapan instrumen evaluasi kegiatan. Pada tahap ini juga dilakukan penyesuaian materi dengan regulasi terkait pendanaan koperasi dan kebijakan akuntansi koperasi.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui bimbingan teknis yang mencakup: (1) penyampaian materi teknik proyeksi keuangan koperasi, meliputi penyusunan proyeksi arus kas, laporan laba rugi, dan neraca proyeksi; (2) penyampaian materi analisis kelayakan usaha koperasi, termasuk identifikasi peluang usaha, perhitungan biaya dan manfaat, serta analisis risiko pasar, operasional dan kredit; (3) penyampaian materi tata kelola keuangan koperasi yang akuntabel, meliputi prinsip transparansi, pencatatan keuangan yang tertib, mekanisme pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi; (4) latihan dan diskusi studi kasus untuk mengaplikasikan materi sesuai kondisi koperasi peserta; serta (5) sesi berbagi pengalaman dan tanya jawab.

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan dan capaian pembelajaran peserta. Evaluasi juga digunakan sebagai dasar dalam merumuskan tindak lanjut penguatan kapasitas koperasi kelurahan.

Instrumen Evaluasi dan Teknik Analisis Data

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan instrumen *pretest* dan *posttest* untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah bimbingan teknis. Instrumen disusun berdasarkan tiga materi utama kegiatan, yaitu proyeksi keuangan koperasi, analisis kelayakan usaha dan tata kelola keuangan koperasi yang akuntabel. Indikator evaluasi mencakup pemahaman peserta mengenai penyusunan proyeksi arus kas, laporan laba rugi, neraca proyeksi, analisis kelayakan usaha, identifikasi risiko usaha, prinsip transparansi, pencatatan keuangan yang tertib serta mekanisme pengawasan dan kepatuhan regulasi koperasi.

Penilaian hasil *pretest* dan *posttest* menggunakan skala Likert 1–5, dengan kategori 1= sangat tidak paham, 2= tidak paham, 3= cukup paham, 4= paham dan 5= sangat paham. Instrumen evaluasi terdiri atas 9 butir pernyataan/soal yang disesuaikan dengan indikator materi bimbingan teknis. Selain menggunakan *pretest* dan *posttest*, evaluasi juga dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi aktif peserta selama kegiatan, keterlibatan dalam diskusi serta penilaian terhadap hasil latihan penyusunan proyeksi keuangan.

Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan skor rata-rata *pretest* dan *posttest* pada setiap indikator. Analisis dilakukan melalui perhitungan selisih skor dan persentase peningkatan untuk menggambarkan perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menilai efektivitas bimbingan teknis dalam meningkatkan kapasitas pengurus KKMP.

Indikator Keberhasilan Kegiatan

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

- a. Tingkat kehadiran dan partisipasi aktif peserta selama kegiatan;
- b. Peningkatan pemahaman peserta terhadap proyeksi keuangan, analisis kelayakan usaha, dan tata kelola keuangan koperasi;
- c. Kemampuan peserta dalam menyusun proyeksi keuangan sederhana dan mengidentifikasi kelayakan usaha koperasi;
- d. Meningkatnya kesadaran peserta terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan koperasi.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa bimbingan teknis dilaksanakan pada 28–30 Oktober 2025 bertempat di Hotel Claro Makassar dan difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Sasaran kegiatan adalah 152 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) se-Kota Makassar yang diwakili oleh pengurus koperasi. Pelaksanaan kegiatan mencakup penyampaian materi, latihan penyusunan proyeksi keuangan, diskusi studi kasus serta sesi tanya jawab dan berbagi pengalaman.



Gambar 1. Penyajian Materi

Sumber: Data diolah (2026)

Untuk menilai efektivitas kegiatan, evaluasi dilakukan melalui instrumen *pretest* dan *posttest* yang mengukur pemahaman peserta pada tiga aspek utama, yaitu proyeksi keuangan koperasi, analisis kelayakan usaha dan tata kelola keuangan koperasi yang akuntabel. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan skor setelah peserta mengikuti bimbingan teknis. Secara umum, rata-rata skor *pretest* sebesar 2,17 meningkat menjadi 4,17 pada *posttest*, dengan selisih rata-rata sebesar 2,01 poin atau meningkat sekitar 92,56%. Hasil ini menunjukkan bahwa bimbingan teknis memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pemahaman peserta. Hasil perbandingan skor *pretest* dan *posttest* disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Pretest dan Posttest Peserta Bimbingan Teknis

Indikator Evaluasi (Sesuai Materi Bimtek)	Rata-rata Pretest	Rata-rata Posttest	Selisih	Interpretasi
Pemahaman penyusunan proyeksi arus kas koperasi	2,00	4,15	+2,15	Meningkat signifikan
Pemahaman penyusunan proyeksi laporan laba rugi koperasi	2,05	4,20	+2,15	Meningkat signifikan
Pemahaman penyusunan neraca proyeksi koperasi	1,95	4,05	+2,10	Meningkat signifikan
Pemahaman analisis kelayakan usaha koperasi	2,10	4,10	+2,00	Meningkat signifikan
Kemampuan mengidentifikasi peluang usaha koperasi	2,30	4,25	+1,95	Meningkat
Pemahaman analisis risiko usaha koperasi (pasar, operasional, kredit)	2,15	4,05	+1,90	Meningkat
Pemahaman prinsip transparansi pengelolaan keuangan koperasi	2,40	4,35	+1,95	Meningkat
Pemahaman pencatatan keuangan koperasi yang tertib dan akuntabel	2,35	4,30	+1,95	Meningkat
Pemahaman mekanisme pengawasan dan kepatuhan regulasi koperasi	2,20	4,10	+1,90	Meningkat

Sumber: Data Diolah (2026)

Hasil evaluasi melalui instrumen *pretest* dan *posttest* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator yang diukur. Rata-rata skor *pretest* berada pada kategori "tidak paham" hingga "cukup paham", sedangkan skor *posttest* meningkat ke kategori "paham" dan "sangat paham". Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator penyusunan proyeksi keuangan koperasi, yang menunjukkan efektivitas bimbingan teknis dalam meningkatkan kapasitas teknis peserta. Selain itu, peningkatan pada indikator tata kelola keuangan mencerminkan meningkatnya kesadaran peserta terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Peserta mampu mengidentifikasi sumber pendapatan koperasi (misalnya unit simpan pinjam dan unit usaha lainnya) serta mengelompokkan komponen biaya secara lebih sistematis. Dalam latihan, peserta mulai memahami hubungan antara proyeksi arus kas, proyeksi laba rugi dan proyeksi neraca sebagai satu rangkaian perencanaan yang saling terkait, sehingga dokumen rencana bisnis menjadi lebih logis dan kredibel.



Gambar 2. Penyajian Materi 2

Sumber: Data diolah (2026)

Pada aspek analisis kelayakan usaha, pemahaman peserta meningkat dari 2,10 menjadi 4,10 atau sebesar 95,24%. Kemampuan mengidentifikasi peluang usaha koperasi meningkat dari 2,30 menjadi 4,25 atau sebesar 84,78%, sedangkan pemahaman analisis risiko usaha koperasi, yang meliputi risiko pasar, operasional dan kredit, meningkat dari 2,15 menjadi 4,05 atau sebesar 88,37%. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teknis tentang penyusunan angka-angka proyeksi, tetapi juga mulai mampu melihat usaha koperasi dari perspektif kelayakan dan risiko.

Pada aspek tata kelola keuangan koperasi, pemahaman prinsip transparansi pengelolaan keuangan meningkat dari 2,40 menjadi 4,35 atau sebesar 81,25%. Pemahaman tentang pencatatan keuangan koperasi yang tertib dan akuntabel meningkat dari 2,35 menjadi 4,30 atau sebesar 82,98%, sementara pemahaman mekanisme pengawasan dan kepatuhan regulasi koperasi meningkat dari 2,20 menjadi 4,10 atau sebesar 86,36%. Meskipun persentase peningkatan pada aspek tata kelola relatif lebih rendah dibandingkan aspek proyeksi keuangan, skor akhir *posttest* tetap menunjukkan kategori paham hingga sangat paham. Hal ini menandakan bahwa peserta mulai menyadari pentingnya tata kelola keuangan sebagai fondasi pengelolaan koperasi yang sehat.

Selain hasil kuantitatif, observasi selama kegiatan menunjukkan bahwa peserta terlibat aktif dalam latihan dan diskusi. Dalam sesi praktik, peserta mulai mampu mengidentifikasi sumber pendapatan koperasi, mengelompokkan komponen biaya dan memahami keterkaitan antara proyeksi arus kas, proyeksi laba rugi, dan proyeksi neraca sebagai satu kesatuan dokumen perencanaan usaha. Pada sesi analisis kelayakan, peserta juga mulai dapat mengaitkan rencana usaha koperasi dengan kondisi pasar

lokal, kapasitas pengurus dan potensi risiko yang dihadapi. Di sisi lain, pada materi tata kelola keuangan, peserta menunjukkan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pencatatan yang tertib, transparansi kepada anggota serta mekanisme pengawasan melalui RAT, pengawas dan audit.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan *capacity building* melalui bimbingan teknis terpadu efektif dalam meningkatkan kapasitas pengurus koperasi, terutama dalam aspek perencanaan keuangan, penilaian kelayakan usaha dan tata kelola keuangan yang akuntabel. Peningkatan yang cukup tinggi pada indikator proyeksi arus kas, laporan laba rugi dan neraca proyeksi memperlihatkan bahwa materi yang bersifat teknis dan aplikatif lebih mudah dipahami ketika disampaikan melalui kombinasi ceramah, latihan dan diskusi studi kasus. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa proyeksi keuangan merupakan instrumen penting dalam pengendalian usaha dan pengambilan keputusan karena membantu organisasi menilai kebutuhan likuiditas, kemampuan operasional dan prospek keberlanjutan usaha (Kasmir, 2019). Di samping itu, hasil ini sejalan dengan pandangan Brigham dan Ehrhardt (2017) bahwa proyeksi keuangan merupakan salah satu dasar utama dalam menilai kredibilitas rencana usaha dan kemampuan pengelolaan risiko keuangan.

Peningkatan pemahaman peserta pada aspek analisis kelayakan usaha menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada keterampilan menyusun angka, tetapi juga pada kemampuan berpikir evaluatif dalam melihat peluang dan risiko usaha koperasi. Hal ini penting karena koperasi yang ingin mengembangkan usaha dan mengakses pembiayaan perlu mampu menunjukkan bahwa rencana usahanya layak secara ekonomi dan keuangan. Temuan ini memperkuat pandangan Umar (2015) bahwa analisis kelayakan usaha membantu organisasi meminimalkan risiko kegagalan dengan menilai potensi keuntungan, hambatan operasional dan kemungkinan risiko sebelum keputusan usaha diambil. Dengan demikian, peningkatan pada aspek ini menjadi indikator bahwa peserta mulai memahami bahwa proposal pinjaman tidak cukup hanya memuat proyeksi keuangan, tetapi juga harus didukung oleh analisis usaha yang rasional.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan *capacity building* melalui bimbingan teknis terpadu efektif untuk meningkatkan kesiapan pengurus koperasi dalam menyusun rencana bisnis dan dokumen pendukung pengajuan pembiayaan. Peningkatan pemahaman peserta terhadap proyeksi keuangan memperkuat argumen bahwa perencanaan keuangan merupakan instrumen utama dalam pengendalian usaha dan pengambilan keputusan, sekaligus menjadi komponen penting yang dinilai dalam proses pembiayaan (Kasmir, 2019; Brigham & Ehrhardt, 2017). Dengan memahami keterkaitan arus kas, laba rugi dan neraca proyeksi, koperasi berpotensi menghasilkan proposal pinjaman yang lebih rasional serta memudahkan proses verifikasi kelayakan.



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab Peserta

Sumber: Data diolah (2026)

Dari sisi tata kelola, meningkatnya pemahaman peserta mengenai transparansi, pencatatan keuangan yang tertib, dan mekanisme pengawasan menunjukkan bahwa kegiatan ini turut memperkuat kesadaran kelembagaan koperasi. Temuan ini relevan dengan pandangan [Mardiasmo \(2018\)](#) bahwa akuntabilitas keuangan merupakan kemampuan organisasi dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya secara transparan dan terdokumentasi. Hasil ini juga sejalan dengan regulasi kebijakan akuntansi koperasi yang menekankan pentingnya pelaporan keuangan yang tertib, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, bimbingan teknis yang dilakukan tidak hanya meningkatkan pemahaman administratif, tetapi juga mendorong internalisasi prinsip tata kelola yang sehat dalam koperasi.

Temuan kegiatan ini juga dapat dibandingkan dengan hasil-hasil pengabdian masyarakat sebelumnya yang menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan keuangan bagi pelaku usaha dan organisasi berbasis komunitas. [Syafiudin et al. \(2025\)](#) menunjukkan bahwa pelatihan pembukuan dan pengelolaan keuangan mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap pencatatan dan laporan keuangan sederhana. [Rais et al. \(2025\)](#) juga menegaskan bahwa pendampingan digitalisasi pembukuan dapat memperkuat keteraturan administrasi dan profesionalisme pengelolaan usaha. Sementara itu, [Kuswanto et al. \(2024\)](#) menunjukkan bahwa edukasi pembukuan sederhana membantu pelaku usaha memahami informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dibandingkan dengan studi-studi tersebut, kegiatan ini memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya menekankan pembukuan atau pencatatan, tetapi mengintegrasikan proyeksi keuangan, analisis kelayakan usaha dan tata kelola keuangan akuntabel dalam satu desain bimbingan teknis yang diarahkan pada penyusunan rencana bisnis dan proposal pinjaman.

Kebaruan hasil kegiatan ini terletak pada dua hal. Pertama, kegiatan dilaksanakan dalam skala besar dengan melibatkan 152 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang mewakili seluruh kelurahan di Kota Makassar. Cakupan ini menunjukkan bahwa intervensi pengabdian tidak dilakukan secara parsial, tetapi menjangkau kelompok sasaran yang luas dan strategis. Kedua, kegiatan mengintegrasikan tiga kompetensi utama, yaitu penyusunan proyeksi keuangan, analisis kelayakan usaha dan tata kelola keuangan yang akuntabel, yang dalam banyak kegiatan pengabdian biasanya dibahas secara terpisah. Integrasi ini menjadi penting karena penyusunan rencana bisnis dan proposal pinjaman koperasi memang menuntut keterkaitan yang erat antara kelayakan usaha, rasionalitas proyeksi, dan kesiapan tata kelola.

Secara praktis, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengurus KKMP menjadi lebih siap dalam menyusun dokumen bisnis yang kredibel dan lebih memahami pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan. Peningkatan ini berimplikasi pada kesiapan koperasi untuk mengakses pembiayaan secara lebih meyakinkan, karena lembaga pemberi dana pada umumnya menilai tidak hanya potensi usaha, tetapi juga kualitas perencanaan keuangan dan kemampuan tata kelola organisasi. Oleh sebab itu, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa bimbingan teknis terpadu dapat menjadi model intervensi yang efektif untuk memperkuat kapasitas koperasi kelurahan dalam menjawab tuntutan regulasi, kebutuhan pengembangan usaha dan akses pendanaan yang berkelanjutan.

Namun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan. Evaluasi yang digunakan masih berfokus pada perubahan pemahaman peserta melalui *pretest* dan *posttest*, sehingga belum sepenuhnya mengukur keberlanjutan implementasi hasil pelatihan pada dokumen rencana bisnis masing-masing koperasi. Oleh karena itu, tindak lanjut yang lebih teknis, seperti pendampingan penyusunan proposal pinjaman per koperasi dan monitoring implementasi tata kelola keuangan pascapelatihan, perlu

dilakukan agar dampak kegiatan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi berlanjut pada perubahan praktik pengelolaan koperasi

Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa bimbingan teknis penyusunan proyeksi keuangan, analisis kelayakan usaha dan penguatan tata kelola keuangan koperasi yang akuntabel telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Makassar. Melalui kegiatan yang dilaksanakan pada 28–30 Oktober 2025 di Hotel Claro Makassar dan melibatkan 152 KKMP, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya perencanaan keuangan, penilaian kelayakan usaha serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa integrasi materi proyeksi keuangan, analisis kelayakan usaha dan tata kelola keuangan yang akuntabel mampu meningkatkan kesiapan koperasi dalam menyusun rencana bisnis dan proposal pinjaman yang lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran pengurus koperasi akan pentingnya pencatatan keuangan yang tertib, mekanisme pengawasan organisasi serta kepatuhan terhadap regulasi sebagai fondasi keberlanjutan koperasi. Ke depan, diperlukan pendampingan lanjutan yang lebih aplikatif dan berkelanjutan agar hasil bimbingan teknis dapat diimplementasikan secara konsisten pada pengelolaan dan pengembangan usaha masing-masing koperasi.

Referensi

- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2017). *Financial management: Theory and practice* (15th ed.). Cengage Learning.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. (2025). Surat permintaan kesediaan narasumber kegiatan bimbingan teknis penyusunan rencana bisnis dan pengajuan proposal pinjaman bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih (Nomor: 500.3/258/Diskop&Ukm/X/2025).
- Kasmir. (2019). *Analisis laporan keuangan* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Kuswanto, R., Breliastiti, R., Lukman, H., Marundha, A., & Wahyudi, S. (2024). Edukasi pembukuan sederhana bagi UMKM Mitra Bumdes Medal Rahayu Desa Ambit Situraja Sumedang. *Jurnal Abdi Mandala*, 3(1), 37–50.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi Offset.
- Nugroho, A., & Hadi, S. (2021). Tata kelola keuangan dan keberlanjutan koperasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(2), 101–112.
- Presiden Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rais, A. H., Yusuf, Y. Y., Adriansyah, A., Faisal, A., & Nashiruddin, A. (2025). Pendampingan digitalisasi pembukuan pada UMKM Jeruk Ceya Kota Makassar melalui aplikasi Buku Warung. *Jurnal Abdi Mandala*, 4(2), 67–75.

- Syafiudin, A., Saprudin, Putri, S., Safitri, D. F., & Destriana, A. G. (2025). Pelatihan pembukuan dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan bagi pengrajin kulit di Sukaregang Garut. *Jurnal Abdi Mandala*, 4(2), 47–55.
- Tambunan, T. (2020). *UMKM dan koperasi di Indonesia: Tantangan dan peluang*. Ghalia Indonesia.
- Umar, H. (2015). *Studi kelayakan bisnis (Edisi revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.